

Penyampaian SPT Elektronik

D Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : AGUS YUSPIAN

NPWP : 071756506406000 / 3203022912680006

NITKU : 3203022912680006000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 31/01/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 93506106302257031020

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Tutup

NO JENIS SPT TA

1 1770S

2 1770S

3 1770

4 SPT Tahunan OP 2015

2018/01-12

0

Nihil

0 CSV

SUMBER

AKSI

eFiling Web

eFiling Web

eForm



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS YUSPIAIN
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
3. NHK : 689042

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	630.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/85 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 277.500.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 352.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.400.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.400.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	636.650.000
III. HUTANG	Rp.	241.809.451
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	394.840.549

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.